

**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

*Kaka Afreza  
Npp : 30.0385  
Program Studi Keuangan Publik*

*Pembimbing : Drs. Decky Dwi Utomo, M.M.*

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *Regional government financial independence is a condition in which the level of ability of local governments to maximize regional revenues in using the regional income and expenditure budget. Based on the percentage contribution of the South Bangka Regency's regional original income for 2019-2021, it is very low, namely only around 6.8% of the total realized regional income. So that it can be said that the local government has not been able to maximize its efforts in exploring regional potential which has resulted in low regional original income (PAD).* **Purpose:** *This study aims to analyze the financial independence of the Regional Government, the inhibiting factors, and the efforts made by the South Bangka Regency government to increase regional financial independence for the 2019-2021 fiscal year.* **Method:** *This study used a qualitative method with a descriptive approach and data collection used a descriptive method with an inductive approach. This study uses the theory of financial ratio analysis by Mahmudi which consists of the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional financial independence, the ratio of effectiveness and efficiency ratio of Regional Own Revenue.* **Result:** *The results of this study show a ratio analysis of the degree of fiscal decentralization of 6.8% in the less category, an analysis of the ratio of regional financial independence of 7.8% in the low category with an instructive pattern, and the ratio of regional financial dependence of 83.07% with a very high category. From the results of this study, South Bangka Regency is still classified as very low in the implementation of local government. In overcoming this problem, the researcher's suggestion is that the Regional Government can maximize the realization of tax and retribution revenues in order to get the maximum Regional Original Revenue.* **Conclusion:** *Youth participation the Lorong Literasi Gowa Programs in Paccinongang Sub District has been going well because of the synergy of the local government and its youth community. In order to increase youth participation, it is recommended to optimize information technology, social media and collaborate with various components including entrepreneurs.*

**Keywords:** *Analysis, Financial Independence, Financial Ratio Analysis*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kemandirian keuangan pemerintah daerah adalah kondisi dimana tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerimaan daerah secara maksimal dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan persentase kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2019-2021 sangat rendah yaitu hanya sekitar 6,8% dari total realisasi pendapatan daerahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah daerah belum mampu untuk memaksimalkan upaya dalam menggali potensi daerah yang mengakibatkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan Pemerintah Daerah, faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2019-2021. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menggunakan teori analisis rasio keuangan oleh Mahmudi yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 6,8% dalam kategori kurang, analisis rasio kemandirian keuangan daerah 7,8% dalam kategori rendah sekali dengan pola instruktif, dan rasio ketergantungan keuangan daerah 83,07% dengan kategori sangat tinggi. Dari hasil penelitian ini, di Kabupaten Bangka Selatan tergolong masih sangat rendah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam mengatasi permasalahan tersebut saran peneliti adalah Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi guna mendapatkan Pendapatan Asli Daerah yang maksimal. **Kesimpulan:** Partisipasi pemuda dalam program lorong literasi di Kelurahan Paccinongang telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat dengan komunitas pemudanya. Guna meningkatkan partisipasi pemuda dalam program lorong literasi, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial serta berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk wirausahawan.

**Kata kunci:** Analisis, Kemandirian Keuangan, Analisis Rasio Keuangan

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia dengan sistem pemerintahan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan fleksibilitas komitmen dan hak sebagai warga negara. Dalam Struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dipertegas bahwa pemerintah mempunyai peranan penting untuk mengarahkan kehidupan bernegara yang maju sehingga dapat mewujudkan tujuan negara yang sebesar-besarnya, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini kemandirian suatu daerah diperlukan untuk menunjang tujuan negara dengan membentuk otonomi daerah untuk mewujudkannya.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menjadi desentralistik dimana tiap-tiap daerah memiliki kewenangan mengurus daerahnya masing-masing dengan memperhatikan potensi yang ada pada masing-masing daerah agar dapat di Kelola dengan optimal sebagai salah satu cara untuk mengelola keberagaman karakteristik wilayah di Indonesia.

Dalam pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah yang berperan sebagai pelaku ekonomi daerah, mereka perlu secara mandiri membiayai semua urusan pemerintahan dan urusan pembangunan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Kemandirian keuangan ini juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah.

Suatu daerah dikatakan berhasil apabila pemerintah daerah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik dengan cara memperoleh pendanaan yang cukup. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan memiliki hak untuk memperoleh penerimaan atas pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah. Hak yang dimiliki ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah agar lebih baik dalam mengelola potensi daerah secara optimal agar sumber-sumber pendapatan dapat menunjang kemandirian suatu pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Kemandirian keuangan daerah lebih banyak digunakan untuk tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan daerah. Pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah, (Kuncoro, 2004) mengatakan bahwa cara yang digunakan dalam ukuran tingkat kemandirian keuangan daerah adalah rasio pendapatan utama daerah terhadap APBD. Mengukur derajat kemandirian keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung rasio keuangan. (Mahmudi, 2019) menjelaskan bahwa terkait cara mengukur kemandirian keuangan daerah yang melaksanakan otonomi daerah mengacu pada pendapatan daerah dengan menerapkan beberapa rasio keuangan, antara lain: Rasio Desentralisasi, Rasio Ketergantungan dan Rasio Kemandirian Fiskal.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah otonom pada tingkat provinsi, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhak untuk melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan sepaham dengan kondisi masing-masing daerah dengan memanfaatkan anggaran yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dari pusat.

Meskipun demikian, wilayah Kepulauan Bangka Belitung masih ter subordinasi pada dana dari pusat, sehingga nilai tukar devisa ke kabupaten-kabupaten dengan gaji

teritorial masih sangat besar untuk mendukung usaha pemerintah dalam rangka mewujudkan kemajuan di daerah untuk melakukan peningkatan kesejahteraan rakyat.

**Tabel 1. 1**  
**Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Tahun Anggaran 2019-2021**

Dana Perimbangan	2019	2020	2021
DAU	1.046.862.622.000	942.308.451.000	939.550.039.000
DBH	204.414.067.706	117.160.284.746	237.440.870.998
DAK	491.156.874.143	545.345.060.864	516.892.969.333
Total	<b>1.742.433.563.849</b>	<b>1.604.813.796.610</b>	<b>1.693.883.879.331</b>

Sumber : diolah penulis dari [bakuda.babelprov.go.id](http://bakuda.babelprov.go.id)

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Setelah beberapa waktu saya melakukan pendalaman mengenai daerah saya, saya mengambil beberapa permasalahan yang pertama yaitu tentang kemandirian keuangan daerah kabupaten bangka selatan yang saya lihat menggunakan rasio ketergantungan dan kemandirian pada tahun 2019 sampai tahun 2021. kemudian untuk masalah kedua yaitu apa saja faktor faktor yang menjadi penghambat dari kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten bangka selatan, dan untuk yang ketiga adalah upaya dari pemerintah daerah kabupaten bangka selatan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah bangka selatan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menganalisis kemampuan keuangan daerah, terutama mengenai rasio yang digunakan dalam penelitian. Penulis mengambil 3 penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal ilmiah dan thesis. Ketiga penelitian tersebut yaitu sebagai berikut :

*Pertama*, Sari *et al* (2021) dengan judul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah menemukan Hasil yang didapatkan adalah 6 kabupaten yang termasuk dalam klasifikasi kemampuan anggaran daerah tinggi, 2 kabupaten termasuk dalam klasifikasi sedang dan 1 kabupaten termasuk dalam klasifikasi mou.

*Kedua*, Prakoso *et al* (2019) dengan judul Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah. Menemukan Hasil primer menunjukkan kekambuhan keadaan otonomi itu Dana daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan keuangan. Pada saat itu menunjukkan, di mana ada dampak negatif yang kritis pada kebebasan moneter teritorial pada kemelaratan. Artinya, kondisi otonomi keuangan daerah di kabupaten dan kota di Wilayah Jawa Tengah akan berdampak pada perluasan pembangunan keuangan daerah dan pengurangan jumlah penduduk miskin.

*Ketiga*, Oki *et al* (2020) yang berjudul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. Menemukan Hasil dari ini Tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat sangat tinggi, secara normal, 84,29 persen. Hal ini ditegaskan melalui otonomi keuangan daerah Belu yang luar biasa moo pada normal 8,08 persen

dan termasuk dalam kategori pendidik, artinya bagian pemerintah pusat lebih dominan daripada kebebasan pemerintah lingkungan.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan tiga penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dengan berbagai fokus dan lokus penelitian, penulis mengambil judul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan penulis di Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam tiga tahun anggaran, yaitu 2019-2021. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pada penelitian kali ini peneliti mendapati bahwa kemandirian keuangan di kabupaten bangka selatan masihlah sangat rendah dan banyak sekali faktor penghambatnya yang menghambat kemandirian keuangan di kabupaten bangka selatan.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam tiga tahun anggaran, yaitu 2019-2021. dan untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat serta upaya - upaya apa yang sudah di lakukan pemerintah bangka selatan dalam mengatasi masalah kemandirian keuangan di kabupaten bangka selatan.

## **II. METODE**

Menurut (Sugiono 2016, 13) penelitian yang dilakukan dengan strategi investigasi subyektif, itu akan lebih bersifat grafis. Berdasarkan reaksi para ahli di atas, dalam renungan ini pencipta menggunakan pendekatan yang jelas dengan pendekatan induktif. Penyelidikan ekspresif, yang dikenal dalam istilah jarak jauh sebagai penyelidikan ekspresif, adalah salah satu dari beberapa jenis rencana penyelidikan yang mampu memberikan penggambaran dan penggambaran yang terperinci dan jelas tanpa ada perlakuan khusus terhadap pertanyaan yang ditanyakan.

Sejalan dengan penelitian deskriptif, penulis pun menggunakan pendekatan induktif, yakni suatu pendekatan yang mencoba memberikan pemahaman dari konsep yang khusus ke umum, penarikan suatu kesimpulan dilakukan secara umum berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Pendekatan induktif dapat dikatakan sebagai cara berpikir guna memberikan alasan menggunakan pernyataan-pernyataan khusus atau lebih spesifik agar tercipta argumentasi yang lebih bersifat umum.

Terkait dengan penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis saat ini, menurut (Cresswell 2016, 16) "Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena yang dieksplorasi dalam penelitian". Sehubungan dengan hal tersebut dalam penyelidikan subjektif tentang hal ini tidak menunjukkan kemungkinan dan kesempatan bagi penulis untuk dapat mengkaji dan menyusun informasi faktual yang berisi data tentang pertanyaan yang direnungkan. Sehingga informasi yang terukur dapat dimanfaatkan dan diolah dalam penelitian subjektif untuk memberikan gambaran tentang pertanyaan yang ingin ditanyakan dan lebih akurat meningkatkan data yang akan disampaikan serta mengasah penyelidikan subjektif itu sendiri.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini membahas tentang uraian dan analisis data-data yang diperoleh dari pengumpulan baik secara primer maupun sekunder yang dilakukan penulis dilapangan. Data primer penelitian ini merupakan hasil dari wawancara dengan para informan. Data tersebut merupakan data pokok dimana dalam penganalisisan ditunjang oleh data-data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait untuk memperkuat dan memperdalam hasil analisis.

Hasil penelitian akan menjelaskan mengenai kemandirian keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, faktor yang menjadi penghambat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan terutama dalam masalah pendapatan asli daerah serta upaya pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

##### **3.1.1 Kemandirian keuangan daerah**

##### **3.1.2 Pendapatan Transfer**

Kabupaten Bangka Selatan selain memiliki sumber-sumber pendapatan internal, juga memiliki sumber pendapatan lain yaitu pendapatan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi secara langsung bagi Kabupaten Bangka Selatan. Seperti pada tabel 1.1 yang telah diperhitungkan sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah pendapatan transfer Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebanyak Rp 1.742.433.563.849 menjadi 1.604.813.796.610 pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 1.693.883.879.331. Kemudian kontribusi pendapatan transfer mencapai angka rata rata 89%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan memiliki ketergantungan sangat tinggi dari pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi.

Sekretaris BAKUDA Kabupaten Bangka Selatan yakni Bapak Jusvinar, S.STP. menyebutkan bahwa, “Dana transfer saat ini menjadi prioritas dan penyumbang terbesar untuk Kabupaten Bangka Selatan dalam pendapatan daerah yang berasal dari pusat maupun provinsi. ”.

Pada pendapatan transfer Kabupaten Bangka Selatan, penyumbang terbesar terdapat pada pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat atau dikatakan sebagai dana perimbangan. Dana ini merupakan jumlah dana yang didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah guna memfasilitasi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan pemerintah daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan memiliki 2 (Dua) tujuan utama, yakni yang pertama untuk menurunkan kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah lainnya. Kedua, menciptakan keseimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah lainnya.

Tujuan dari disalurkan dana perimbangan tersebut sama halnya dengan pendapat dari Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BAKUDA Kabupaten Bangka Selatan yakni Sunardi, SE. menyatakan bahwa:

Pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Selatan tergolong rendah sehingga pendapatan transfer sangat dibutuhkan. Meningkatnya total pendapatan transfer bagi Kabupaten Bangka Selatan disebabkan oleh adanya kebijakan daripada pemerintah pusat serta dilakukan untuk menghindari adanya ketimpangan fiskal di setiap daerah.

Melihat hal yang disampaikan tersebut bisa disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangka Selatan yang tidak tercapai secara maksimal tidak hanya dikarenakan realisasi PAD yang berada di bawah target PAD yang telah ditetapkan namun ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan atas dana transfer yang disalurkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi juga akan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangka Selatan apabila hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan, dimana ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bangka Selatan terhadap dana transfer akan semakin meningkat dan sebaliknya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangka Selatan akan semakin menurun.

### 3.1.3 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting untuk menentukan kemandirian keuangan suatu daerah. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Bangka Selatan selama 3 tahun (Tahun Anggaran 2019-2021) dapat dilihat pada data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan tahun anggaran 2019-2021. Berikut tabel yang menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019-2021 Berdasarkan Rincian Sumber Penerimaannya:

**Tabel 4. 1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019-2021 Berdasarkan Rincian Sumber Penerimaannya**

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>PAD</b>			
	Target	52.870.487.549,00	73.547.126.175,00	63.206.413.406,32
	Realisasi	62.941.444.714,19	50.213.605.545,44	63.333.020.971,49
<b>2</b>	<b>Dana Transfer</b>			
	Target	815.493.072.611,00	685.776.676.246,00	783.609.397.464,79
	Realisasi	799.447.448.854,37	662.439.138.232,74	781.628.650.491,60
<b>4</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>			
	Target	79.110.475.983,00	85.964.195.000,00	33.945.837.464,00
	Realisasi	78.527.626.928,00	31.143.032.735,00	33.849.377.389,00
<b>5.</b>	<b>Total Pendapatan Daerah</b>			
	Target	947.474.036.143,00	845.287.997.421,00	880.761.648.335,11
	Realisasi	940.916.520.496,56	743.795.776.513,18	878.811.048.852,09

Sumber: Data diolah Penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan penerimaan pendapatan daerah tahun 2019-2021 di Kabupaten Bangka Selatan menurun pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021. Jika dilihat dari sisi persentase ketercapaian target yang telah ditetapkan, secara keseluruhan setiap sektor pendapatan daerah telah mampu mencapai target tersebut.

Ketercapaian target hanya terjadi pada pendapatan asli daerah tahun anggaran 2019 dan 2021, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dan target tidak tercapai. Namun demikian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bangka Selatan tahun anggaran 2019-2021 masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019-2021**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase(%)
<b>2019</b>	947.474.036.143,00	940.916.520.496,56	99,3%
<b>2020</b>	845.287.997.421,00	743.795.776.513,18	87,9%
<b>2021</b>	880.761.648.335,11	878.811.048.852,09	99,7%

Sumber : Data diolah Penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada tahun 2020 dari realisasi 940 M menjadi 743 M, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali dari 743 M menjadi 878 M. Pada realisasinya, total pendapatan daerah Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan walaupun persentase 3 tahun tersebut terbilang tinggi. Pendapatan daerah lebih didominasi oleh pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi. Kontribusi pendapatan transfer mencapai angka di atas 88% ke atas sedangkan kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Selatan hanya sebesar kurang dari 8%.

Hal tersebut menjadi permasalahan dimana tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bangka Selatan masih termasuk kategori rendah dalam jangka 3 (lima) tahun anggaran. Keseluruhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bangka Selatan sudah berjalan cukup baik namun belum maksimal.

### **3.1.4 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan tentunya menjadi salah satu bagian penting dalam mengukur kemandirian keuangan Kabupaten Bangka Selatan. Hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan potensi daerah dan berbagai sumber penerimaan daerah yang secara langsung dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan guna memenuhi segala kebutuhan penyelenggaraan pemerintahannya. Perkembangan PAD Kabupaten Bangka Selatan bisa dilihat pada tabel 1.2 dimana realisasi PAD belum maksimal dimana kontribusi PAD Kabupaten Bangka Selatan berada di angka 6%-8%, apabila dirata-ratakan persentase kontribusi PAD selama 2019-2021 hanya sebesar 6,8% terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bangka Selatan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka permasalahan kontribusi PAD yang rendah maka tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangka Selatan akan menjadi rendah dan begitu pula sebaliknya.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Bangka Selatan, Bapak Jusvinar, S.STP. menjelaskan bahwa:

Kelemahan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan selama ini terletak dimana daerah belum mampu mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dalam memanfaatkan sumber



penerimaan PAD yang telah ada contohnya retribusi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Permasalahan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya realisasi PAD Kabupaten Bangka Selatan yang tidak memenuhi target PAD yang telah ditetapkan serta kelemahan dalam manajemen penerimaan sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan.

Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan saat ini masih perlu berupaya mengoptimalkan setiap sumber penerimaan PAD Kabupaten Bangka Selatan dalam pemungutan dan pengelolannya demi memaksimalkan pencapaian realisasi PAD Kabupaten Bangka Selatan agar mencapai target penerimaan PAD Kabupaten Bangka Selatan yang diharapkan dan telah ditetapkan sebelumnya.

Hal tersebut harus diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan dikarenakan PAD menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan sendiri tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang menjadi sumber penerimaan PAD itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber PAD lain yang sah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 yang telah ditampilkan sebelumnya.

Tabel 1.2 sebelumnya menunjukkan bahwa total PAD Kabupaten Bangka Selatan didominasi oleh Pendapatan melalui Pajak Daerah. Namun pajak daerah di Kabupaten Bangka Selatan mengalami keadaan yang fluktuatif karena masih mengalami penurunan pada tahun tertentu. Pada tahun 2019 jumlah Pendapatan Pajak Daerah mencapai 24 M dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 19 M. Kemudian, pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang menjadi 28 M. Hal tersebut mempengaruhi tingkat PAD Kabupaten Bangka Selatan yang dihasilkan, karena pajak daerah merupakan sumber penerimaan terbesar bagi PAD Kabupaten Bangka Selatan yang apabila tidak mengalami peningkatan signifikan secara terus-menerus maka akan sangat berpengaruh pada PAD Kabupaten Bangka Selatan yang akan dihasilkan.

Jenis kedua yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan ialah Retribusi Daerah. Pada pengelolannya mengalami keadaan yang juga fluktuatif. Pada tahun 2019 retribusi daerah Kabupaten Bangka Selatan mencapai 14,6 M dan pada tahun 2020 tidak mengalami penurunan yang signifikan menjadi 14,2 M. Tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 9 M. Hal tersebut disebabkan tidak optimalnya pendataan terhadap masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang terdaftar memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah retribusi atas jasa maupun perizinan yang telah diberikan dan dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi.

Jenis ketiga yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada pengelolannya mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 memperlihatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai 3,9 M. Pada Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 4,2 M, Pada tahun 2021 hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Kabupaten Bangka Selatan meingkat menjadi 4,6 M. Hal tersebut apabila diperbaiki dan dapat ditingkatkan dengan baik oleh pemerintah daerah

Kabupaten Bangka Selatan tentunya akan membantu meningkatkan PAD Kabupaten Bangka Selatan menjadi lebih baik.

Sumber lain-lain PAD yang sah menjadi salah satu sumber terakhir dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Sumber lain-lain PAD yang sah Kabupaten Bangka Selatan mengalami keadaan yang fluktuatif, yang mana pada tahun 2019, Sumber lain-lain PAD yang sah Kabupaten Bangka Selatan sebesar 19,6 M dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 12 M. Pada tahun 2021 sumber lain-lain PAD yang sah Kabupaten Bangka Selatan kembali meningkat menjadi 20,8 M.

Melihat uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan belum maksimal terjadi pada beberapa sumber penerimaan PAD Kabupaten Bangka Selatan yakni Pajak, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dimana pemungutan atas pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bangka Selatan masih mengalami penurunan selama tahun anggaran 2019-2021 yang seharusnya apabila dilakukan dengan baik dapat terus meningkat setiap tahunnya secara signifikan dan tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian realisasi PAD Kabupaten Bangka Selatan yang lebih tinggi dan dapat melampaui target.

Kepala Sub Bidang Anggaran BAKUDA Kabupaten Bangka Selatan yakni Bapak Suseno, A. MD. juga menyebutkan bahwa:

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam penerimaan daerah masih sangat kurang. Hal ini diakibatkan karena daerah Kabupaten Bangka Selatan tidak memiliki perusahaan-perusahaan yang besar sehingga pemungutan pajak hanya diambil dari dana bagi hasil pajak seperti pajak kendaraan dan untuk retribusi daerah belum maksimal dilakukan, dan juga banyak potensi daerah yang seharusnya bisa menjadi sumber penerimaan daerah belum diolah dan belum dikenakan pajak daerah sehingga masih minim dalam pengelolaannya.

Berkenaan dengan hal tersebut apabila dilihat dari sisi penerimaan pajak pemerintah daerah sendiri telah dibatasi oleh Undang-undang. Hal tersebut juga diikuti dengan adanya pembatasan retribusi oleh pemerintah pusat. Melihat karakteristik Kabupaten Bangka Selatan yang mempunyai keunggulan pada bidang perkebunan dan pertambangan yang seharusnya berpotensi menjadi sumber PAD, namun saat ini pajak atas pertambangan dan perkebunan merupakan hak atas pemerintah pusat.

Pajak daerah yang merupakan hak pemerintah daerah ialah Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan atau PBBP2. Penerimaan dari sisi pajak PBBP2 pun masih tergolong sangat kecil. Sedangkan penerimaan dari sisi retribusi di daerah Kabupaten Bangka Selatan masih rendah dikarenakan potensi dari sisi retribusi daerah Kabupaten Bangka Selatan belum memiliki jumlah yang cukup banyak. Hal inilah yang menyebabkan belum maksimalnya sisi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bangka Selatan. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada seberapa banyak potensi daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah namun efektivitas pengelolaan potensi daerah yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada juga turut menjadi hal yang harus diperhatikan.

### **3.2 Faktor yang mempengaruhi Kemandirian keuangan Daerah Bangka Selatan**

#### **3.2.1 Pemungutan pajak dan retribusi daerah belum optimal**

Kemampuan keuangan Kabupaten Bangka Selatan tentunya dapat dilihat melalui hasil pendapatan asli daerah yang ada, salah satunya adalah pajak dan retribusi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut kurang optimalnya pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Bangka Selatan sangat ditentukan oleh sistem manajemen yang berfungsi dalam mengoptimalkan kemandirian pemungutan pajak dan retribusi. Hal ini berhubungan dengan sumber daya manusia yang belum memadai dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta rendahnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan tentunya dapat merencanakan beberapa program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat meningkatkan hasil pendapatan asli daerah sesuai tujuan yang diharapkan. Sistem pengelolaan dan prosedur administrasi dapat dilakukan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi agar tidak terjadi kesulitan dalam proses pembayaran pajak sendiri di masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan juga dapat mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan terkait pentingnya membayar pajak agar timbul kesadaran dalam diri masyarakat untuk mau membayar pajak. Selain itu, pemanfaatan aplikasi berbasis online juga akan turut memudahkan pelayanan pembayaran pajak bagi masyarakat serta pendataan ulang juga dapat dilakukan secara online agar pemerintah sendiri memiliki database para wajib pajak dan pendataan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah retribusi atas usahanya sehingga akan lebih terorganisir dan optimal dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Bangka Selatan, Jusvinar, S.STP. menjelaskan bahwa:

Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan memiliki kelemahan dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah baik itu dalam mencari sumber penerimaan PAD dan memanfaatkan segala sumber penerimaan PAD yang telah ada..

Permasalahan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya realisasi PAD Kabupaten Bangka Selatan yang tidak memenuhi target PAD yang telah ditetapkan serta kelemahan dalam manajemen penerimaan sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan.

Bapak Deni Purnomo, S.Kom., M.M. selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BAKUDA Kabupaten Bangka Selatan menjelaskan berkenaan dengan tidak tercapainya realisasi PAD Kabupaten Bangka Selatan atas target yang ditetapkan serta rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, yakni:

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah daerah menjadi hambatan dalam memaksimalkan pemungutan dan pengelolaan atas sumber Pendapatan Asli Daerah, karena pajak dan retribusi merupakan bagian penting pemerintah dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan saat ini masih perlu berupaya mengoptimalkan setiap sumber penerimaan PAD Kabupaten Bangka Selatan dalam

pemungutan dan pengelolaannya demi memaksimalkan pencapaian realisasi PAD Kabupaten Bangka Selatan agar mencapai target penerimaan PAD Kabupaten Bangka Selatan yang diharapkan dan telah ditetapkan sebelumnya.

Hal tersebut harus diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan dikarenakan PAD menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### **3.2.2 Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Selatan**

Dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian daerah yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Bangka Selatan masih dalam kategori Rendah Sekali yang berarti kemandirian keuangan pemerintah daerah masih belum baik hal ini akibat dari pemerintah daerah yang kurang menggali potensi daerah yang ada serta kelalaian dalam tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hasil penelitian yang menunjukkan selama 3 tahun terakhir realisasi penerimaan PAD Kabupaten Bangka Selatan hanya setahun yang memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya, Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan. Tidak berhenti sampai disitu realisasi belanja daerah juga tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga pada setiap tahunnya terdapat sisa anggaran yang cukup besar yang seyogyanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang dapat menunjang kemajuan daerah.

Kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan juga dilihat melalui hasil pendapatan asli daerah yang ada, salah satunya adalah pajak dan retribusi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut kurang optimalnya pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Bangka Selatan sangat ditentukan oleh sistem manajemen yang berfungsi dalam mengoptimalkan kemandirian pemungutan pajak dan retribusi. Hal ini berhubungan dengan sumber daya manusia yang belum memadai dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta rendahnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak.

### **3.2.3 Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Dana Transfer**

Ketergantungan pemerintah kabupaten Bangka Selatan pada transfer merupakan disinsentif eksternal terhadap kapasitas fiskal daerah, karena transfer pemerintah pusat atau provinsi lebih berkontribusi terhadap total pendapatan daerah Bangka Selatan daripada PAD Bangka Selatan itu sendiri. Melihat APBD Kabupaten Bangka Selatan tahun anggaran 2019-2021 masih mengandalkan dan didominasi oleh kontribusi keuangan yang cukup besar dari pihak eksternal, dimana pemerintah pusat berperan penting dalam memfasilitasi kegiatan dan program-program pembangunan daerah. pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Ketergantungan tersebut berupa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Besarnya dana transfer tersebut juga disebabkan karena banyaknya mandatoris pending yang diamanatkan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah yang harus dipenuhi. Sehingga hal tersebut menimbulkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi dan apabila terus terjadi maka daerah tidak akan secara maksimal dalam mengeksplorasi potensi-potensi pada daerahnya sendiri yang dapat digunakan

untuk meningkatkan PAD daerahnya sehingga akan turut mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer.

### **3.3 Upaya yang di Lakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah**

#### **3.3.1 Mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah**

Sumber-sumber PAD Kabupaten Bangka Selatan dapat bertambah dalam hal kapasitas serta jumlah potensi daerah yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan PAD dan bertambah dalam hal realisasi pemungutan pendapatan daerah. Bertambahnya sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dalam hal kapasitas tentunya dengan pemanfaatan potensi daerah yang dapat digali dengan semaksimal mungkin sehingga tidak ada potensi daerah Kabupaten Bangka Selatan yang terabaikan dan tidak dikelola dengan baik, mengingat begitu banyak potensi daerah yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya BAKUDA harus mencari peluang-peluang sumber penerimaan PAD lainnya dengan teliti dan cermat serta sejumlah strategi agar realisasi penerimaan PAD bisa mencapai hasil lebih dari target penerimaan yang ditetapkan.

Beberapa strategi dan langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Pemutakhiran data wajib pajak dan data perizinan usaha yang telah diberikan;
- b. Pendataan wajib pajak maupun retribusi daerah yang baru;
- c. Penetapan ulang besaran yang harus dibayar oleh wajib pajak maupun retribusi;
- d. Melakukan kegiatan monitoring pajak restoran/rumah makan maupun tempat yang menggunakan perizinan usaha serta meningkatkan pengasawan terhadap penerimaan pajak, retribusi hingga hasil penjualan barang milik daerah yang termasuk lain-lain PAD yang sah;
- e. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama para wajib pajak terhadap kewajibannya, melalui kegiatan penyuluhan Perda tentang pajak dan retribusi daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dan dinas terkait daerah.

#### **3.3.2 Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi pendapatan asli daerah kabupaten bangka selatan**

Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan tentunya dapat merencanakan beberapa program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi di daerah untuk meningkatkan hasil pendapatan asli daerah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Untuk menghindari kesulitan bagi masyarakat dalam proses pembayaran pajaknya sendiri, dapat dilakukan pengelolaan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan juga dapat mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan terkait pentingnya membayar pajak agar timbul kesadaran dalam diri masyarakat untuk mau membayar pajak. Selain itu, pemanfaatan fitur atau aplikasi berbasis online juga akan turut memudahkan pelayanan pembayaran pajak bagi masyarakat serta pendataan ulang juga dapat dilakukan secara online agar pemerintah sendiri memiliki database para wajib pajak dan pendataan masyarakat

yang memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah retribusi atas usahanya sehingga akan lebih terorganisir dan optimal dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi. Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan perlu mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi daerah yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Kabupaten Bangka Selatan memiliki kondisi geografis yang didominasi oleh kawasan pertanian dan perkebunan sehingga apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka hal tersebut dapat menjadi salah satu sumber penerimaan bagi PAD Kabupaten Bangka Selatan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dapat lebih memperhatikan keadaan para pekerja seperti buruh tani dan perkebunan yang ada, memberikan sejumlah bantuan fasilitas yang akan menunjang hasil panen yang lebih baik. Sehingga dapat menjadi salah satu keunggulan bagi Kabupaten Bangka Selatan apabila hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat diekspor ke daerah lainnya. Tentunya akan memberikan peningkatan bagi PAD Kabupaten Bangka Selatan, secara otomatis kemandirian keuangan daerah akan menjadi lebih baik.

### **3.3.3 Mengurangi ketergantungan pememrintah daerah kabupaten bangka selatan terhadap dana transfer**

Ketergantungan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada transfer merupakan disinsentif eksternal terhadap kemandirian fiskal daerah, karena transfer pemerintah pusat atau provinsi lebih berkontribusi terhadap total pendapatan daerah Bangka Selatan daripada PAD itu sendiri di Bangka Selatan sebagai pendapatan utama. Melihat APBD Kabupaten Bangka Selatan tahun anggaran 2019-2021 masih bergantung dan didominasi oleh kontribusi pembiayaan yang cukup besar dari pihak eksternal, dimana pemerintah pusat berperan penting dalam memfasilitasi kegiatan dan program-program pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Ketergantungan tersebut berupa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Besarnya dana transfer tersebut juga disebabkan karena banyaknya mandatorispending yang diamanatkan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah yang harus dipenuhi. Sehingga hal tersebut menimbulkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi dan apabila terus terjadi maka daerah tidak akan secara maksimal dalam mengeksplorasi potensi- potensi pada daerahnya sendiri yang dapat digunakan untuk meningkatkan PAD daerahnya sehingga akan turut mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer.

Kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam mengurangi tingkat ketergantungan dengan meningkatkan pendapatan yaitu:

- a. Menyebarkan Surat Pembayaran Objek Pajak (SPOB) PBB ke masyarakat yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan tetapi belum dikenakan PBB;
- b. Menerbitkan Instruksi Bupati Bangka Selatan agar seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menjadi panutan membayar PBB-P2;
- c. Mengadakan rapat evaluasi pencapaian penerimaan PBB-P2 dengan para Kepala OPD, Camat dan Lurah setiap 1 bulan sekali;
- d. Memberikan insentif kepada Kepala Kampung/Lurah dan Camat yang persentasu pelunasan PBB-P2 di wilayahnya paling tinggi.

Sebagai contoh, pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan saat ini sedang giat berupaya meningkatkan realisasi pemungutan dan pelaporan pajak daerah dengan menganjurkan wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak daerah dan mengembangkan teknologi pembayaran berbasis web dengan harapan kenaikan pajak terwujud.

#### IV. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dibagian penutup tulisan ini penulis melakukan penarikan kesimpulan terkait kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Bangka Selatan yang dirangkum sebagai berikut:

1. Kemandirian keuangan daerah diukur berdasarkan hasil analisis rasio yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Selatan masih rendah dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah sendiri.
  - a. Rasio Derajat Desentralisasi 2019-2021 sebesar 6,8%, hasil ini menunjukkan tingkat kemampuan keuangan daerah masing kurang untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah
  - b. Rasio Kemandirian Keuangan rata rata dari 2019-2021 7,8%, hal ini memberikan hasil bahwa kemandirian keuangan masih rendah sekali, bahkan terjadi pola instruktif yang dimana pemerintah pusat masih memiliki peran penting untuk membiayai pemerintah daerah.
  - c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah rata-rata dari 2019-2021 sebesar 83,07%, hal ini memberi hasil ketergantungan daerah dari pendapatan dana transfer umum dan bantuan keuangan provinsi masih sangat tinggi.
2. Menganalisis faktor yang menjadi penghambat tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangka Selatan yaitu, Pemungutan Retribusi dan Pajak Daerah yang belum optimal, hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi PAD yang masih rendah. Kemudian potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, hal ini ditandai dengan banyaknya aktivitas perekonomian daerah yang belum dikenakan pajak dan retribusi. Serta tingginya tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Bangka Selatan terhadap dana transfer, hal ini ditandai dengan tingkat kemampuan PAD rendah dibanding dana transfer umum yang masih sangat tinggi.
3. Pemerintah daerah melakukan upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan beberapa strategi peningkatan serta kebijakan dalam meningkatkan PAD. Sebagai contoh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan saat ini sedang giat berupaya meningkatkan realisasi pemungutan dan pelaporan pajak daerah dengan menganjurkan wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak daerah.

**Keterbatasan Penelitian :** Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian yaitu waktu yang dimiliki oleh informan selama melakukan wawancara. Selain itu, penulis terkendala lokasi penelitian yang termasuk tidak dalam pusat kota serta biaya dalam melakukan penelitian. Penelitian hanya dilakukan di BAKUDA Kabupaten Bangka Selatan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*) :** Penulis menyadari bahwa hasil temuan penelitian ini masih termasuk analisa awal. Penulis menyarankan untuk adanya penelitian lanjutan mengenai Kemandirian keuangan kabupaten bangka selatan karena masih belum banyak peneliti yang membahas mengenai masalah ini. Kabupaten bangka selatan masih termasuk kabupaten yang baru dibangun, untuk itu perlu penelitian selanjutnya yang

diharapkan menjadi titik awal atau acuan bagi Kabupaten Bangka Selatan dalam melakukan perubahan kedepannya.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Keuangan Daerah serta staff dari Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Bangka Selatan yang telah memberikan kesempatan serta pengalaman baru bagi penulis selama melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan memberi dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Jalu Aji Prakoso, F. S. (2019). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah*, Vol. 4/No.1/2019Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kamilaus Konstase Oki, F. W. (2020). *Jurnal Ekonomi Pembangunan. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu*, Vol. 5 No.2, Hal. 1-6.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiono. (2016). *Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.